

**PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK, PDRB PER KAPITA,  
DAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR, TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**Skripsi**

**PRETI TAMARA**

**01021381722195**

**EKONOMI PEMBANGUNAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK, PDRB PER KAPITA DAN  
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

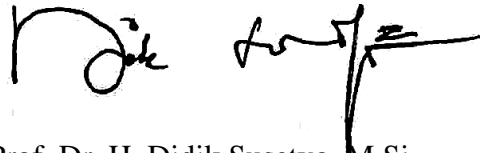
Disusun Oleh:

Nama : Preti Tamara  
Nim : 01021381722195  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian / Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing  
Ketua



Tanggal : 1 November 2021

Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP. 196007101987031003

Anggota



Tanggal : 2 November 2021

Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 196903142014092001

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK, PDRB PER KAPITA DAN  
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

Disusun Oleh :

Nama : Preti Tamara  
NIM : 01021381722195  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

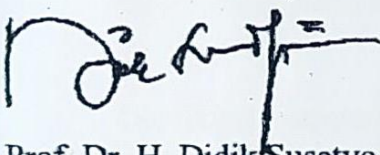
Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 02 Desember 2021 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang 02 Desember 2021

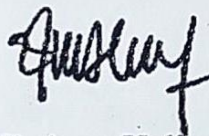
Ketua,

Anggota,

Anggota



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP. 196007101987031003



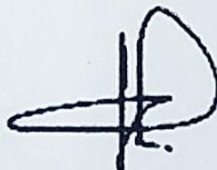
Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 197007162008012015



Feny Marissa, S.E., M.Si  
NIP. 199004072018032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN ..... 17-2-2022  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI .....

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Preti Tamara  
Jurusan : 01021381722195  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

**Pengaruh Kepadatan Penduduk, PDRB Per Kapita dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.**

Pembimbing :

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
Anggota : Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 02 Desember 2021

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, maka saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 20 Desember 2021

Pembuat Pernyataan,



Preti Tamara  
Nim. 01021381722195



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kepadatan Penduduk, PDRB Per Kapita dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan”.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepadatan Penduduk PDRB Per Kapita dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.” ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Palembang, 20 Desember 2021

Penulis,



Preti Tamara

## UCAPAN TERIMAKASIH

Selama menyelesaikan penyusunan Skripsi ini Penulis telah banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga Saya bisa menyelesaikan skripsi Saya. Rasa syukur tak terhingga Saya ucapkan atas doa-doa yang telah dikabulkan-Nya.
2. Terimakasih untuk Mamak, Ayah, dan Keluarga yang selalu menyemangati dan mendoakan Tamara, selalu memberikan segala bentuk usaha yang terbaik untuk Tamara.
3. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
6. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M. Si dan Ibu Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritik dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Feny Marissa S.E., M.Si selaku Dosen Penguji atas bimbingan, koreksi dan arahan yang diberikan.
8. Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan ketika perkuliahan berlangsung.
9. Rekan-rekan Dosen di lingkungan Jurusan Ekonomi Pembangunan yang bersedia telah memberikan pemahaman materi saat menjalani proses perkuliahan.
10. Mbak Yosi selaku Pengelola Ekonomi Pembangunan yang telah membantu mengurus seluruh urusan administrasi dan kepentingan lainnya saat menjalani proses bimbingan dan perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan “Len-molen” yang telah memberikan support untuk menulis serta memberikan informasi-informasi terkait berlangsungnya perkuliahan.
12. Kiki, Sintia, Najiya, dan Amar yang telah membantu Tamara ketika mengalami kesulitan dan terus menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Resi, Amila, dan Yuk Zel yang telah memberikan semangat untuk terus melangkah dan memotivasi.
14. Teman-teman satu bimbingan yang saling memberikan semangat.
15. Teman-teman konsentrasi Keuangan Daerah yang menemani selama masa perkuliahan.
16. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2017 yang saling memberikan dukungan dari awal perkuliahan hingga sekarang.

17. Teman yang setia di masa lalu SD, SMP, dan SMA, yang telah mengantarkan sampai dengan gerbang perjuangan dan mengajarkan Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
18. Rekan-rekan seperjuangan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu pesatu.



## ABSTRAK

### PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK, PDRB PER KAPITA DAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

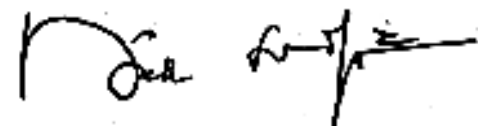
Oleh :

Preti Tamara; Didik Susetyo; Anna Yulianita

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh variabel Kepadatan Penduduk, PDRB Per Kapita dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2000-2019. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah Analisis Regresi Berganda menggunakan data *time series*. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa secara simultan Kepadatan Penduduk, PDRB per kapita dan Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tetapi secara parsial Kepadatan Penduduk tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PKB.

**Kata kunci :** *Kepadatan Penduduk, PDRB per kapita, Jumlah Kendaraan Bermotor, PKB*

Ketua,



**Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si**  
NIP. 196007101987031003

Anggota,



**Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si**  
NIP. 197007162008012015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



**Dr. Mukhlis, S.E., M.Si**  
NIP. 197304062010121001

## ABSTRACT

### THE EFFECT OF POPULATION DENSITY, PDRB PER CAPITA AND NUMBER OF MOTOR VEHICLES ON MOTOR VEHICLE TAX RECEIVING IN THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA

By :

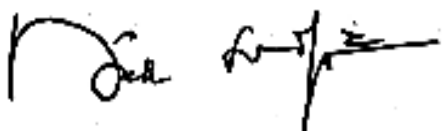
**Preti Tamara; Didik Susetyo; Anna Yulianita**

This study aims to analyze and determine the effect of Population Density, PDRB Per Capita and Number of Motorized Vehicles on Motor Vehicle Tax Revenue in South Sumatra Province. The data used is secondary data obtained from the Technical Implementation Unit of the Regional Revenue Agency (UPTB) of South Sumatra Province and the Badan Pusat Statistik (BPS) for the period 2000-2019. The method used in this analysis is Multiple Regression Analysis using time series data. Based on the results of the analysis, it can be concluded that simultaneously Population Density, PDRB per capita and Number of Motorized Vehicles have a significant effect on Motor Vehicle Tax Revenue (PKB), but partially Population Density has no effect on PKB Revenue.

**Keywords:** *Population Density, PDRB per capita, Number of Motorized Vehicles, PKB*

First Advisor,

Member,




**Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si**  
NIP. 196007101987031003



**Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si**  
NIP. 197007162008012015

Acknowledge,

Head of Economic Development Program



**Dr. Mukhlis, S.E., M.Si**  
NIP. 197304062010121001

## RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Preti Tamara

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : M. Karang, 05 Mei 1999

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : Perumahan Al-Fattah Residence, Blok Al-Alim  
No. 24

Email : Tamaranew26@gmail.com

No. HP : 085761860922

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri 02 Pendopo

SLTP : SMP Negeri 01 Pendopo

SLTA : SMA Negeri 01 Palembang

Pengalaman Organisasi : -

Penghargaan Prestasi : -



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2. Manfaat Praktis .....	8
<b>BAB II STUDI PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Penerimaan Negara .....	9
2.1.2. Konsep dan Definisi.....	11
2.1.2.1. Sumber Pendapatan Daerah .....	11
2.1.3. Pajak.....	14
2.1.3.1. Pengertian Pajak.....	14
2.1.3.2. Fungsi Pajak .....	15

2.1.3.3. Asas-Asas Pajak .....	15
2.1.3.4. Asas Pembagian Beban .....	17
2.1.3.5. Asas Pemungutan Pajak.....	18
2.1.4. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	19
2.1.5. Teori Kependudukan .....	21
2.1.6. Definsi PDRB Per Kapita .....	24
2.2. Penelitian Terdahulu .....	25
2.3. Kerangka Pemikiran.....	29
2.4. Hipotesis.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Ruang Lingkup.....	32
3.2. Data .....	32
3.2.1. Jenis Data .....	32
3.2.2. Sumber Data.....	32
3.2.3. Data Menurut Waktu.....	33
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4. Teknik Analisis .....	33
3.4.1. Regresi Linier Berganda .....	34
3.4.1.1. Uji Model .....	34
3.4.1.2. Uji Asumsi Klasik.....	35
3.5. Uji Signifikasi .....	37
3.5.1. Uji Simultan (Uji F) .....	37
3.5.2. Uji Parsial (Uji t).....	37
3.5.3. Koefisien Determinasi.....	38
3.6. Definisi Operasional Variabel.....	38
3.6.1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	38
3.6.2. Kepadatan Penduduk (X1).....	39
3.6.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita (X2) .....	39
3.6.4. Jumlah Kendaraan Bermotor (X3).....	40

3.7. Hubungan Antar Variabel .....	40
3.7.1. Hubungan Variabel Kepadatan Penduduk dengan Penerimaan Pajak...	40
3.7.2. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dengan Penerimaan Pajak .....	41
3.7.3. Hubungan Jumlah Kendaraan Bermotor dengan Pajak .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	42
4.1.1. Gambaran Umum Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	42
4.1.2. Pertumbuhan PDRB Per Kapita di Provinsi Sumatera Selatan .....	45
4.1.3. Pertumbuhan Kepadatan Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan. ....	47
4.1.4. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor.....	49
4.2. Hasil Estimasi dan Pembahasan.....	51
4.2.1. Hasil Estimasi Model Regresi Berganda .....	51
4.2.1.1. Uji Asumsi Klasik .....	52
4.2.1.2. Uji Multikolinearitas.....	53
4.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas .....	54
4.2.1.4. Uji Autokorelasi .....	55
4.2.2. Uji Statistik .....	55
4.2.2.1. Uji F.....	55
4.2.2.2. Uji t.....	56
4.3. Pembahasan.....	57
4.3.1. Pengaruh Kepadatan Penduduk, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan .....	57
4.3.2. Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan .....	57
4.3.3. Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan .....	58
4.3.4. Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Pertumbuhan Penerimaan	

Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
5.1. Kesimpulan .....	61
5.2. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Kepadatan Penduduk, PDRB Per Kapita dan Jumlah Kendaraan Bermotor.....	5
Tabel 1.2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2014 – 2019 (Dalam Rupiah) .....	5
Tabel 4.1. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2000-2019 (Dalam Rupiah).....	44
Tabel 4.2. Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan Tahun 2000-2019.....	46
Tabel 4.3. Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk .....	48
Tabel 4.4. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Laju Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2000-2019.....	50
Tabel 4.5. Hasil Model Estimasi Regresi Berganda.....	51
Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
Tabel 4.7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan Godfrey.....	54
Tabel 4.8. Hasil Uji Autokorelasi .....	55
Tabel 4.9. Hasil Uji t.....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	30
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas.....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada. Pajak menjadi prioritas utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan penerimaan yang diterima dari sektor-sektor lainnya (Utami, 2014).

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak yaitu Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Komponen penyumbang pajak terbesar Pendapatan Asli Negara pada bulan Agustus tahun 2020 penerimaan pajak mencapai 676,9 Triliun atau 56 persen pada target penerimaan pajak, maka pajak pada bulan Agustus akhir penerimaan pajak mengalami kontraksi 15,6 persen dalam komponen ini realisasi Pendapatan Pajak

Negara masih terus mengalami kontraksi, dimana pertumbuhan pajak negatif dibandingkan dengan tahun lalu karena adanya keterlambatan kegiatan ekonomi fiskal (Kemenkeu.go.id).

Pajak Provinsi bersifat limitatif yang mengandung arti bahwa Pajak Provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dan hanya dapat menambah retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Adanya pembatasan jenis pajak yang dipungut oleh Provinsi terkait dengan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang terbatas sehingga hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya Provinsi dapat memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut secara intensif jika dipandang hasilnya kurang memadai atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Susetyo, 2009).

Kewenangan hak dan tanggung jawab daerah telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Menurut Eko (2019) jenis Pajak Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi dan jenis Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten/Kota, diatur mengenai jenis Pajak Provinsi yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok

Tujuan perpajakan adalah sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal lain sebagaimana diuraikan dimuka. Akan tetapi masalahnya ialah bagaimana merancang suatu struktur perpajakan yang membantu tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Di negara terbelakang dasar perpajakan boleh dikata lemah. Oleh karena itu di dalam menentukan pilihan di antara berbagai macam dan jenis pajak negara harus mempertimbangkan disamping tujuan-tujuan di atas, masalah-masalah seperti kemampuan administrasi untuk mengenakan pajak dan mengumpulkannya secara jujur dan efisien, dan dampak kenaikan pajak pada struktur politik dan sosial negara (Jhingan, 2014).

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pada saat ini pelaksanaan pemungutan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Komdak Sumatera Selatan dan Kepala Perum

Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) (Sari, 2005).

Penopang perekonomian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 mempunyai nilai PDRB sebesar Rp 21,83 Triliun dan menjadi Rp 29,15 Triliun pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha ekonomi disuatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berguna untuk indikator ekonomi memuat berbagai unsur lainnya. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2013) menyebutkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor, apabila seluruh jenis usaha meningkat, berarti daya beli masyarakat dan ekonomi daerah itu juga akan meningkat.

Pajak kendaraan bermotor besar kecilnya dipengaruhi banyak faktor diantaranya adalah kepadatan penduduk, PDRB per kapita dan jumlah kendaraan bermotor itu sendiri, jumlah penduduk (Prawita, 2017) dan secara teoritis, besarnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan PDRB Per Kapita. Dengan tingginya jumlah penduduk dan semakin tingginya PDRB Per Kapita menyebabkan semakin meningkatnya daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor sehingga menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, maka semakin meningkat pula sektor Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Ariansi, 2013).

**Tabel 1.1 Jumlah Kepadatan Penduduk, PDRB Perkapita dan Jumlah Kendaraan Bermotor**

Tahun	Kepadatan Penduduk (Km <sup>2</sup> )	PDRB Per Kapita ADHK	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit)
2014	87	30.636,27	1.919.996
2015	88	31.549,30	1.307.725
2016	89	32.699,50	1.482.625
2017	90	34.059,71	1.145.992
2018	91	35.659,82	1.204.506
2019	92	37.243,07	1.177.213

Sumber : BPS Provinsi Sumsel Tahun 2014 – 2019

Jika dilihat dari data Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah Kepadatan Penduduk dan PDRB Per Kapita di Provinsi Sumatera Selatan disetiap tahunnya terus mengalami peningkatan, tetapi tidak dengan jumlah kendaraan bermotor, dimana pada tahun 2014 dan 2016 merupakan data tertinggi pada 6 tahun terakhir, dan ditahun lainnya cenderung mengalami fluktuasi..

Bila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariansi (2013) yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, PDRB Perkapita dan jumlah kendaraan bermotor maka semakin meningkat pula penerimaan pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2014 - 2019 (Dalam Rupiah)**

No	Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor
1	2014	663.903.700.000
2	2015	814.363.152.908
3	2016	777.486.400.742
4	2017	1.098.985.858.854
5	2018	884.985.858.854
6	2019	905.093.000.000

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan



Dapat dilihat dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa data di atas selama 6 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan terutama pada tahun 2017 merupakan data tertinggi yaitu sebesar Rp 1.098.985.858.854 dari tahun lainnya sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 mempunyai data penerimaan yang menurun. Ada banyak hal yang menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun. Jika dibandingkan dengan teori, adanya perbandingan terbalik antara data jumlah kendaraan bermotor terhadap data penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana dari Tabel 1.1 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang tertinggi adalah pada tahun 2014 dan 2016, sedangkan pada Tabel 1.2 penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun yang sama yakni pada tahun 2014 dan 2016 cenderung mengalami penurunan, di mana yang seharusnya penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014 lebih tinggi dari 2016.

Maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan antara data dan teori tidak sama dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Di mana dalam penelitian yang dilakukan Ariansi (2013), menyatakan bahwa jika data jumlah kendaraan bermotor meningkat maka meningkat pula penerimaan pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu penelitian ini ingin membuktikan bagaimana pengaruh perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan, dengan melihat perubahan penerimaan PKB terhadap perubahan Kepadatan Penduduk, Produk Domestik Bruto (PDRB) Per Kapita, dan Jumlah Kendaraan Bermotor. Jika terjadi peningkatan PKB maka kesejahteraan masyarakat meningkat pula serta kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor juga meningkat, yang berarti peningkatan

jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap peningkatan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana Pengaruh Kepadatan Penduduk, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Pengaruh Kepadatan Penduduk, PDRB Perkapita, dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sumatera Selatan Selama Tahun 2000 - 2019.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Kepadatan Penduduk, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2000 - 2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan manfaat dan mengetahui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan menjadi acuan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.

- b. Memberikan manfaat untuk mengetahui bagaimana kinerja Keuangan Perpajakan Kendaraan Bermotor terhadap tingkat Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Memberikan manfaat untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja meningkatnya Jumlah Kepadatan Penduduk terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dalam pengetahuan pada tingkat kepadatan penduduk di daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- b. Berdasarkan hasil dari penelitian, diharapkan dapat memberikan referensi pada pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
- c. Dari penelitian ini dapat mengetahui bagaimana pengaruh Kepadatan Penduduk, PDRB Per Kapita dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam suatu Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). Akuntansi Sektor Publik : *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba empat.
- Adetya, Bima. (2014). Penerimaan Negara. *Jurnal Ilmiah*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Stan.
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Universitas Brawijaya
- Ariasih, N. N. P., Utama, I. M. S., & Wirathi, I. G. A. P. (2010). Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali. 543–562.
- Ariansi, Pande. (2013). Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Udayana.
- Awaluddin, I., & Tamburaka, S. (2017). *The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari*. *The International Journal of Engineering and Science (IJES)*, 6 (11), 25–34. Diakses dari <https://doi.org/10.9790/1813-0611012534>
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (2019). Bahan Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) Sumatera Selatan. Di akses dari <http://bapenda.sumselprov.go.id/uploads/laporan/LPPD%20BAPENDA%202019.pdf>
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, (2014-2019). Data Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan. Sumatera Selatan : Badan Pusat Statistik. <https://sumsel.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan,(2014-2019). Proyeksi Jumlah Penduduk Sumatera Selatan 2019. Sumatera Selatan : Badan Pusat Statistik. <https://sumsel.bps.go.id>
- Badrudin, Rudi. (2011). Ekonomi Otonomi Daerah, Yogyakarta. UUP STIM YKPN.
- Eko, Afriadil.(2020). Analisis Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2014-2018. *Skripsi Thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Gitaningtyas, Yeni Kurniawati & Taufik Kurrohman. (2014). Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi PAD Pada

Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Gujarati, D.N., (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta

Harahap, Abdul Asri, (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia, Perspektif Ekonomi-Politik*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.

Hendrik, (2011). Analisis Pendapatan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Pulau Besar dan Danau Bawah Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 16 (1).

Hendrik, (2013). Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar Dan Danau Bawah Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi riau. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53 (9), 1689–1699.

Jhingan, ML.(2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hermawati, A. (2014). Analisis Faktor Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Penerimaan Negara.

Kaho, Josef Riwu.(2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. APBN Sumatera selatan tahun 2019.[https://djp.kemenkeu.go.id/portal/images/file\\_artikel/filepdf/kfr/2019/07\\_kfr2019\\_sumsel.pdf](https://djp.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/filepdf/kfr/2019/07_kfr2019_sumsel.pdf)

Lobrian, V., Arisman, A., & Fajriana, I. (2015). Pengaruh Penduduk, Kendaraan Bermotor, Dan Pdrb Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumsel. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE, I(x)*.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta

Mangkoesebroto, Guritno. (2010). *Ekonomi Publik Edisi-III BPF*. Yogyakarta

Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo, (2011) *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset. Yogyakarta.

Mulyadi. (2007). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Produk Domestic Regional Bruto Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Untuk Tahun 2008 – 2012 (Vol. 5, Issue 1983). Universitas Kristen Maranatha.

Mustakim, Fajar R. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonometrika*. 11 (1). Universitas Jambi.

Natasya, I. A. A., & Setiawan, P. E. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Bali. 14 (2), 862–892.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

Pramartha, A., & Aswitari, L. P. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah , Pajak Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bali. 7 (8), 1767–1795. *Ekonomi Pembangunan*,

Prawita, R. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1999-2016. (*Universitas Islam Indonesia. InPhotosynthetica*). (Vol. 2, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8>  
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2>  
<http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018>  
<http://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3>

Puspita, Lisa Martiah 2013, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bengkulu. *Thesis, UNIB*. Benkgkulu.

Rahayu, Nurlita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang PP Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pajak Daerah.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.

- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Kup Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah Dan Kontribusi Daerah.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Resmi, Siti. (2011). Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat : Jakarta.
- Rusyadi, Akhmad. (2005). Peranan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Brebes Tahun 2000-2004.
- Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).
- Sadono, Sukirno. (2006). Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group
- Saputra, M. (2013). Pengaruh Jumlah Dan Mutasi Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 01(01). 1689–1699.
- Sari, Nita Darma. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor Di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 3 (2). Hal 101-112.
- Septian, D. T. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Purwakarta (Doctoral dissertation, STIE Ekuitas).
- Setiasih, R. T. (2017). Analisis Kebijakan Earmarked Tax Atas Peningkatan Pelayanan Publik. Universitas Negeri Semarang.
- Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunarto, & Fatimah, R. D. A. N. (2016). Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015. *Jurnal Akuntansi*. 4 (2). <https://doi.org/10.24964/ja.v4i2.237>
- Suriani, Achmad & Adnan Haris Musa (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produk domestik regional bruto dan tingkat kemiskinan di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 3 (4).



- Susana, Susi. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi Thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Susetyo, D. (2009). Elastisitas Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan. *Jurnal manajemen dan bisnis sriwijaya*.2(13).Syafuruddin, Faisal (2003), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Todaro, Micheal. P. (2000) Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. (Edisi Ketuju), (Terjemahan Haris Munandar). Jakarta : Erlangga.
- Tony, Marsyahrul. (2005). Pajak Penghasilan Potongan Dan Pemungutan. Grasindo: Jakarta.
- Utami, A. T. (2014). Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. In Pajak Daerah. Universitas Diponegoro.
- Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Ekonisia.
- Yani, Ahmad. (2009). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Pers.
- Yunianti, L. N dkk. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*. 2 (1), 1–13. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>
- Yunita, Vinny. (2016). Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Jawa Barat.
- Yuwanto, A. E. (2017). Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 1–21.